

## **Eksistensi dan Revitalisasi Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis-Teologis di Era Kontemporer**

### **The Existence and Revitalization of Christian Education in Indonesia: A Historical-Theological Review in the Contemporary Era**

**(†) Jan Sihar Aritonang<sup>1</sup>**

jan.aritonang@stftjakarta.ac.id

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, DKI Jakarta

#### **Abstrak**

Artikel ini menelaah kedudukan dan peran gereja serta pendidikan Kristen di Indonesia pada era kontemporer dari perspektif sejarah gereja. Dengan studi pustaka historis-deskriptif, penelusuran dimulai dari kedatangan Gereja Katolik Roma bersama Portugis pada abad ke-16, dilanjutkan periode VOC, masa zending abad ke-19, pendudukan Jepang, hingga era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kajian ini juga memetakan perkembangan wawasan pendidikan Kristen mulai dari para reformator abad ke-16 sampai pemikiran empat tokoh pendidikan Indonesia: J. Drost, Aris Pongtuluran, H.A.R. Tilaar, dan Andar Ismail. Penelusuran itu tidak dimaksudkan sebagai kronik semata, tetapi untuk memperlihatkan bagaimana pola-pola historis – kaitan pendidikan dengan penginjilan, pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial, dan negosiasi identitas dengan negara – membentuk persoalan masa kini. Ditemukan bahwa pendidikan Kristen mewarisi potensi yang besar, namun menghadapi tantangan serius: ketentuan Pasal 12 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, orientasi sekolah unggulan yang segregatif dan komersial, penurunan kualitas guru, serta maraknya plagiarisme. Kebaruan kajian ini terletak pada integrasi pemikiran historis keempat tokoh tersebut untuk merumuskan strategi responsif terhadap tantangan etika dan regulasi kontemporer, serta pada pembingkai ulang krisis saat ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai momentum revitalisasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa identitas pendidikan Kristen tidak lagi dapat bertumpu semata-mata pada mata pelajaran agama atau prestasi akademik, tetapi pada ekologi nilai sekolah, mutu dan integritas pendidik, serta keberpihakan kepada kaum lemah – sebuah pergeseran dari paradigma pengkristenan warisan zending menuju paradigma kesaksian (*testimonium*) di tengah masyarakat majemuk.

---

1 Naskah ini merupakan buah pikiran dan penelitian dari Jan Sihar Aritonang yang belum sempat dipublikasikan semasa hidupnya (*posthumous*). Naskah ini kemudian diserahkan, disunting, dan diproses oleh dewan editor Theologia in Loco. Setelah proses peninjauan (*double blind review*), C. S. Rappan Paledung bertanggung jawab untuk berlangsungnya proses revisi naskah ini tanpa mengubah konten dasar apa pun.

**Kata-kata Kunci:** pendidikan Kristen; sejarah gereja; UU Sisdiknas; identitas dan ciri khas; nilai-nilai kristiani; transformasi sosial; revitalisasi

### ABSTRACT

This article examines the position and role of the church and Christian education in Indonesia in the contemporary era from the perspective of church history. Using a historical-descriptive literature study, it traces Christian education from the arrival of the Roman Catholic Church with the Portuguese in the sixteenth century, through the VOC period, the nineteenth-century mission era, the Japanese occupation, and the Old Order, New Order, and Reformation periods. It also maps the development of Christian educational thought from the sixteenth-century reformers to four Indonesian educators: J. Drost, Aris Pongtuluran, H.A.R. Tilaar, and Andar Ismail. This historical tracing is not meant as a mere chronicle; it shows how historical patterns – the link between education and evangelism, education as a path of social mobility, and the negotiation of identity with the state – have shaped present-day problems. The study finds that Christian education inherits considerable assets, yet faces serious challenges: Article 12 of Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the segregative and commercial orientation of “excellent schools,” declining teacher quality, and widespread plagiarism. The novelty of this study lies in integrating the historical thought of these four figures to formulate responsive strategies toward contemporary ethical and regulatory challenges, and in reframing the present crisis not as an end but as a moment of revitalization. It concludes that the identity of Christian education can no longer rest solely on religious instruction or academic achievement, but on the value ecology of the school, the quality and integrity of educators, and partiality toward the weak – a shift from the Christianization paradigm inherited from the missions to a paradigm of witness (*testimonium*) in a plural society.

**Keywords:** Christian education; church history; National Education System Law; identity and distinctiveness; Christian values; social transformation; revitalization

### PENDAHULUAN

Pendidikan Kristen – dalam hal ini penyelenggaraan lembaga pendidikan formal atau sekolah-sekolah Kristen – masih dapat berlangsung di negeri ini. Bahkan dalam arti dan sampai batas-batas tertentu masih bisa berkembang. Namun demikian, tidak sedikit pula lembaga pendidikan [berlabel] Kristen – dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi – yang sudah tamat riwayatnya. Kalaupun tidak sampai mati, banyak yang dalam keadaan sekarat dan tidak jelas sumbangannya bagi pendidikan anak-anak bangsa. Data runtun waktu yang lengkap tentang jumlah sekolah Kristen memang belum tersedia secara terbuka, tetapi beberapa indikator memperlihatkan arah persoalannya. Sekitar tahun 1998 sekolah yang tergabung dalam MPPK berjumlah kira-kira 5.000, sedangkan pada 2023 MPK mencatat sekitar

400 yayasan dengan kurang lebih 7.000 sekolah anggota.<sup>2</sup> Yang ironis, pertumbuhan umat Kristen tidak diikuti oleh pertumbuhan sekolahnya. Jumlah umat Kristen naik dari sekitar 16,5 juta pada 2010 menjadi 20,2 juta pada 2020, tetapi pemetaan MPK atas sekolah-sekolah anggotanya menunjukkan bahwa hanya 10% yang jumlah muridnya tumbuh lebih dari 5% per tahun, 20% tumbuh 2–5%, 30% stagnan, dan 40% menyusut lebih dari 2% per tahun – kelompok terakhir ini dinilai MPK berpeluang besar tutup dalam kurun 2023–2030.<sup>3</sup> Keadaan ini kontras dengan masa lalu. Di Tanah Batak, misalnya, sekolah-sekolah zending RMG menjadikan orang Batak salah satu kelompok suku yang paling melek huruf di Hindia Belanda, dan hampir semua pegawai pemerintah di daerah itu adalah lulusan sekolah zending.<sup>4</sup> Namun, sebagian besar warisan itu tidak kembali ke tangan gereja: dari ratusan sekolah peninggalan zending, pada 1952 hanya 8 dari 356 sekolah rakyat bersubsidi yang dikembalikan kepada HKBP, sementara 348 lainnya menjadi sekolah negeri; pada 1987 HKBP mengelola 8 TK, 54 SD, 46 SMP, 13 SMA, dan 2 sekolah kejuruan.<sup>5</sup> Menghadapi perkembangan dan tantangan pendidikan atau persekolahan di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya – baik berupa persaingan dengan sekolah negeri, beban pembiayaan, ketersediaan dan mutu tenaga pendidik, maupun mutu pendidikan nasional yang masih tertinggal dibanding banyak negara di kawasan Asia<sup>6</sup> –, kalangan pendidikan Kristen di negeri ini perlu mengembangkan

- 2 Aris Pongtuluran, “Pendidikan Kristen di Indonesia Menjelang Abad-21 dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia/Insani,” dalam *Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, ed. oleh Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 2; Hendi D. Irawan, “Tantangan dan Solusi Sekolah Kristen di Indonesia,” Presentation, Bilangan Research Center; Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Mei 2023, slide 6, <https://www.slideshare.net/slideshow/brcmpk-tantangan-dan-solusi-sekolah-kristen-di-indonesia-1pdf/260018332>.
- 3 Irawan, “Tantangan dan Solusi Sekolah Kristen di Indonesia,” slide 2, 5, 7-8 Angka umat Kristen dalam paparan itu diolah Bilangan Research Center dari Sensus Penduduk 2010 dan data Kementerian Agama 2020; penggolongan sekolah didasarkan pada rata-rata pertumbuhan jumlah peserta didik per tahun pada yayasan anggota MPK.
- 4 Jan S. Aritonang, *Mission Schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940*, trans. oleh Robert. R. Boehlke, *Studies in Christian Mission* 10 (Leiden: E.J. Brill, 1994), 331, 336.
- 5 Aritonang, *Mission Schools in Batakland*, 304, 312–13 Data 1952 itu bersumber dari laporan Th. Müller-Krüger, utusan RMG ke Sinode HKBP 1952; data 1987 dari Almanak HKBP 1987.
- 6 Pada PISA 2022, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 untuk literasi membaca, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains, sedangkan rata-rata OECD masing-masing 476, 472, dan 485. Lihat OECD, *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education* (Paris: OECD Publishing, 2023).

wawasannya, meningkatkan kualitas dan kesadarannya, serta menentukan sikap dan langkah-langkah ke depan.

Keprihatinan itu tidak boleh membuat kita melupakan kenyataan bahwa kalangan pendidikan Kristen memiliki warisan dan potensi besar. Kita memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam menyelenggarakan pendidikan, sumber daya manusia yang cukup terlatih—mulai dari guru, dosen, tenaga kependidikan, hingga para pakar dan pemikir pendidikan—yang ada dalam kesadaran sejak awal tentang hakikat dan tujuan pendidikan Kristen, serta sejumlah komunitas dan yayasan di luar lembaga gereja yang berkomitmen dan memiliki dana untuk berkiprah di bidang pendidikan formal. Kita juga mewarisi aset fisik berupa lahan dan bangunan badan zending atau misi dan lembaga pendidikan Kristen, yang sebagian menyatu dengan lahan gereja. Di Tanah Batak, misalnya, gedung sekolah zending dibangun dengan dana yang dihimpun jemaat, dan menurut prinsip zending RMG sekolah itu adalah milik jemaat.<sup>7</sup> Di Pearaja, Tarutung, lahan yang diserahkan Raja Pontas Lumbantobing dan keluarganya kepada zending secara bertahap dipakai untuk gereja, rumah penginjil, sekolah, dan rumah sakit; sebagian di antaranya kini menjadi Kompleks Pusat HKBP.<sup>8</sup> Di Jakarta, kompleks sekolah Kristen peninggalan *Vereeniging voor Christelijke Scholen* (VCS) – perkumpulan yang sejak 1887 mengelola sekolah-sekolah Kristen – membentang dari Salemba hingga Jalan Diponegoro.<sup>9</sup> Semua ini adalah modal berharga yang seharusnya membuat kita tidak perlu memulai dari nol.

Justru di tengah potensi yang besar itu muncul sejumlah tantangan serius. Pertama, ketentuan perundang-undangan—UU Sisdiknas no. 20/2003 pasal 12 ayat (1) a dan PP no. 55/2007 pasal 4 ayat (2)—yang menegaskan hak peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik seagama, dipandang sebagian kalangan Kristen sebagai ancaman

7 Aritonang, *Mission Schools in Batakland*, 254.

8 J. R. Hutauruk, Naek L. Tobing, dan Nelson Siregar, *Raja Pontas Lumbantobing: Riwayat Hidup, Karya, dan Pengabdianannya bagi Pengembangan dan Kemajuan Gereja dan Masyarakat Batak*, ed. oleh Jan S. Aritonang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 133–34.

9 “YBPK Tidak Berhak Menjual Aset,” *Reformata*, 16 September 2008, 4.

terhadap ciri khas dan identitas pendidikan Kristen. Yang dikhawatirkan, sekolah Kristen wajib menyediakan pendidikan agama lain beserta gurunya bagi siswa yang tidak beragama Kristen, sehingga Pendidikan Agama Kristen tidak lagi dapat diberikan kepada seluruh siswa sebagai penanda ciri khas sekolah, sementara beban penyelenggaraannya pun bertambah. Kedua, kecenderungan sebagian sekolah Kristen untuk mendefinisikan keunggulan semata-mata pada prestasi iptek, seperti kemenangan olimpiade sains, sementara nilai dan karakter Kristus dikhawatirkan terabaikan – kritik yang antara lain disuarakan Samuel Karwur dan masih perlu diuji melalui kajian empiris. Ketiga, persoalan kualitas guru di sekolah-sekolah Kristen secara umum (bukan hanya guru Pendidikan Agama Kristen), yang meskipun kalangan Kristen memiliki tradisi penyediaan tenaga pendidikan, belakangan ini semakin banyak dikeluhkan mutunya, bahkan di tengah program sertifikasi yang digulirkan pemerintah. Keempat, maraknya kasus plagiarisme, termasuk dalam penyusunan borang akreditasi, yang kini makin rumit dengan hadirnya kecerdasan artifisial generatif. Gejala ini menunjukkan redupnya integritas dan kejujuran ilmiah, dua nilai yang justru sangat kristiani. Di samping itu, masih ada persoalan integritas pengurus dan pengelola aset pendidikan Kristen, serta kecenderungan sekolah unggulan yang mahal dan segregatif terhadap keluarga miskin.

Tulisan pendek ini tidak dapat dan tidak berambisi untuk mengemukakan semua aspek yang terdapat di dalam judul besar di atas. Yang disajikan di sini adalah selintas-kilas sejarah pendidikan Kristen di negeri ini, perkembangan wawasan (konsep) kalangan Kristen tentang pendidikan, lalu gambaran umum potensi, tantangan dan peluang yang dimiliki atau dihadapi dunia pendidikan Kristen, dengan antara lain mengangkat beberapa isu dan contoh mutakhir. Sejarah di sini tidak dibaca sebagai kronik, tetapi digali dengan tiga maksud sekaligus: menelusuri akar persoalan-persoalan yang disebut di atas, menghidupkan kembali semangat awal yang melandasi berdirinya sekolah-sekolah zending dan misi, serta menimba model-model yang pernah berkembang di masa lampau untuk menjawab tantangan masa kini. Karena itu, tulisan ini bertolak dari tiga pertanyaan: (1) bagaimana

pendidikan Kristen dan wawasan yang menopangnya berkembang dalam sejarah gereja di Indonesia; (2) apa potensi dan tantangan pokok pendidikan Kristen di era kontemporer, dan di mana akar historisnya; serta (3) arah revitalisasi apa yang dapat dirumuskan dari pemikiran J. Drost, Aris Pongtuluran, H.A.R. Tilaar, dan Andar Ismail untuk menjawab tantangan tersebut. Pendidikan teologi tidak dibicarakan secara spesifik, walaupun disinggung di sana-sini. Dengan cakupan tersebut, tulisan ini berusaha untuk memberikan peta besar yang dapat membantu pembaca, khususnya kalangan pendidik Kristen, pengurus yayasan, dan pemimpin lembaga pendidikan Kristen, untuk memahami posisi mereka dalam lanskap pendidikan yang terus berubah, sekaligus mendorong refleksi kritis tentang arah dan kontribusi pendidikan Kristen bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Pada akhirnya, tulisan ini ingin menegaskan bahwa potensi yang kita miliki harus dipertanggungjawabkan, dan tantangan yang kita hadapi harus direspons dengan kesetiaan pada panggilan pendidikan Kristen itu sendiri: menanamkan nilai-nilai Kristiani dan membentuk karakter Kristus dalam diri peserta didik, tanpa memisahkan diri dari pendidikan nasional.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif melalui studi kepustakaan. Sumber primer berupa naskah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan – terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan – dibaca bersama tulisan para tokoh pendidikan Kristen Indonesia, dokumen forum bersama seperti MPPK/MPK dan BK-PTKI, serta literatur sejarah pendidikan Kristen di Nusantara. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan, diverifikasi keasliannya, lalu ditafsirkan secara kronologis dan tematis mengikuti langkah kerja historiografi, sehingga tampak keterkaitan antara warisan masa lampau, wawasan yang berkembang, dan persoalan yang

dihadapi pada masa kini. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: pertama, penelusuran kronologis perkembangan pendidikan Kristen dari masa Portugis hingga Reformasi; kedua, pemetaan tematis atas potensi dan tantangan masa kini beserta akar historisnya; ketiga, sintesis historis-teologis yang membaca pemikiran keempat tokoh sebagai lensa untuk merumuskan arah revitalisasi. Pengalaman sebagai dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta serta asesor BAN-PT digunakan sebagai sumber pelengkap untuk menguji dan memperkaya temuan kepustakaan tersebut.

## DISKUSI

### Sekilas Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia

Pendidikan Kristen sudah berlangsung lama di Indonesia, yaitu sejak kedatangan Gereja Katolik Roma bersama Portugis pada awal abad ke-16, disusul oleh Gereja Protestan (*Gereformeerd*/Calvinis) yang datang bersama Belanda (dalam hal ini VOC) pada abad ke-17 dan 18. Pada awalnya, hanya ada segelintir sekolah dengan kondisi yang sangat sederhana, karena memang tujuan para imperialis Eropa itu bukan untuk memajukan masyarakat pribumi, melainkan untuk memperoleh keuntungan dagang sebesar-besarnya.<sup>10</sup> Karena pada waktu itu kekristenan yang dibawa ke Nusantara bertindih tepat dengan budaya Barat (Eropa), maka tak terhindarkan bahwa pendidikan Kristen yang diperkenalkan itu juga sangat bercorak Barat.

Pendidikan Kristen mengalami kemajuan pesat ketika badan-badan zending (pekabaran Injil dari kalangan Protestan, terutama dari Eropa) secara bertahap semakin banyak berkiprah di Nusantara sejak awal abad ke-19.<sup>11</sup> Badan-badan misi Katolik Roma, yang datang kembali sejak 1860-an, juga tak kalah giatnya mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Bagi kalangan zending dan misi itu pendidikan tidak lepas dari penginjilan (dengan kata

10 Uraian singkat tentang pendidikan Kristen pada zaman Portugis-Spanyol dan VOC lihat dalam Hendrik Kroeskamp, *Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia* (Assen: Van Gorcum, 1974), bb. 1.

11 Uraian rinci tentang pendidikan zending pada abad ke-19 disajikan dalam Kroeskamp, *Early Schoolmasters in a Developing Country*, bb. 1–4; Lihat juga Jan S. Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu telaah Historis-Teologis atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), bb. 1; Soewadji Lazaruth, *Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia* (Jakarta: MPPK, 1984).

lain: pendidikan merupakan pendukung penginjilan). Ketika itu penginjilan masih dianggap identik dengan pengkristenan, sehingga semua murid sekolah zending dan misi dipersiapkan menjadi orang Kristen. Pemerintah Hindia-Belanda (HB), yang berkuasa di negeri ini sejak 1800 hingga 1942, selain menyelenggarakan persekolahannya sendiri (yang bersikap netral terhadap agama), juga memberi subsidi kepada sekolah-sekolah zending dan misi (walaupun dengan syarat-syarat yang cukup berat), karena dengan cara demikian biaya untuk pendidikan masyarakat pribumi jauh lebih murah.

Pada mulanya sekolah-sekolah zending dan misi sepenuhnya meniru sistem pendidikan atau persekolahan corak Barat, baik muatan kurikulumnya maupun pengorganisasian dan penjenjangannya (Sekolah Dasar,<sup>12</sup> Sekolah Lanjutan/Menengah Pertama, Sekolah Lanjutan Atas, dan belakangan Sekolah Tinggi setingkat Universitas). Akan tetapi sejak akhir abad ke-19, bertolak dari pengamatan dan kesadaran bahwa tingkat kebudayaan dan peradaban sebagian masyarakat pribumi juga cukup tinggi, maka kalangan pendidikan zending dan misi juga memberi tempat dan perhatian kepada unsur-unsur budaya pribumi.

Hingga awal abad ke-20 perkembangan pendidikan Kristen di negeri ini cukup menggembirakan dan membanggakan. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan pemerintah HB pada waktu itu, daerah yang paling tinggi peringkatnya di bidang pendidikan adalah yang masyarakatnya sebagian besar sudah Kristen; yang pertama adalah Minahasa, yang kedua Tanah Batak, dan yang ketiga Maluku. Yang dijadikan ukuran antara lain adalah jumlah siswanya (berbanding penduduk) maupun kualitas lulusannya. Karena itu tidak mengherankan bila para pegawai (bahkan pejabat tinggi) pemerintah HB maupun perusahaan-perusahaan swasta yang besar (perkebunan, pertambangan, dsb.) sangat banyak dari kalangan Kristen. Pada gilirannya hal ini meningkatkan jenjang kehidupan sosial-ekonomi mereka.<sup>13</sup>

12 Sekolah Dasar bervariasi dari Sekolah Rakyat 3 tahun (*Volksschool*, berbahasa daerah) hingga *Hollands Inlandsche School* (HIS, berbahasa Belanda) 7 tahun. Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas pada umumnya masing-masing 3 tahun, tetapi bervariasi dalam bidang studi maupun bahasa pengantarnya. Sekolah Tinggi baru didirikan sejak 1910 (di bidang hukum, kemudian kedokteran, teknik dan pertanian).

13 Fakta ini mendorong kalangan Islam untuk memajukan pendidikan dengan meniru sistem/model pendidikan Barat modern yang digunakan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Itulah antara lain

Pada zaman pendudukan dan penjajahan Jepang yang sangat singkat namun mengerikan (1942-45) praktis semua lembaga pendidikan Kristen lumpuh, karena diambil-alih ataupun dialih-fungsikan oleh penguasa Jepang. Jepang menuduh gereja dan umat Kristen sebagai pendukung penguasa kolonial Belanda yang adalah musuhnya, sehingga tak sedikit pemimpin gereja dan sekolah Kristen yang dibunuh, termasuk guru-gurunya. Keadaan morat-marit itu berlanjut pada masa revolusi kemerdekaan (1945-49).<sup>14</sup>

Setelah pengakuan kedaulatan RI (27 Desember 1949) dan memasuki era Orde Lama (1950-1965) sejumlah lembaga pendidikan Kristen coba bangkit kembali, walau tidak semua berhasil. Bahkan kita menyaksikan berdirinya sejumlah universitas Kristen yang kemudian dapat berkembang (paling tidak bertahan hingga kini), antara lain Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, dan Universitas HKBP Nommensen. Tidak berlebihan juga bila dikatakan bahwa pada periode ini banyak lembaga pendidikan Kristen, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang memperlihatkan kualitas yang tinggi dan terpuji serta menghasilkan lulusan yang handal.

Memasuki era Orde Baru yang cukup panjang (1966-1998) di satu sisi semakin banyak didirikan lembaga pendidikan Kristen yang baru, termasuk pada aras perguruan tinggi, sejalan dengan tingkat pertumbuhan kuantitas lembaga pendidikan secara nasional. Kualitasnya juga banyak yang semakin meningkat. Tetapi di sisi lain tidak sedikit juga yang tutup, karena tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah negeri (terutama SD-SD Inpres dan SMP + SMA/SMK Negeri). Kualitas perguruan tinggi Kristen tertentu – walaupun ada yang kian meningkat – tak sedikit pula yang memperlihatkan penurunan; lulusannya semakin tidak diapresiasi dan semakin sulit mendapat lowongan pekerjaan, atau kalah bersaing di dunia kerja. Bagaimana pun juga, pada periode ini masih terdapat sejumlah lembaga

---

yang dilakukan Muhammadiyah (berdiri tahun 1912). Tentang ini lihat Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

14 Gambaran umum situasi umat Kristen pada masa pendudukan Jepang dan revolusi itu terdapat a.l. dalam Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), bb. 3.

pendidikan Kristen (tidak termasuk yang Katolik, yang kualitasnya umumnya selalu terjaga) yang dapat mengembangkan diri dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Pada era 'reformasi' ini (1998 dst.) kita belum melihat adanya perubahan yang substansial dari kondisi pendidikan Kristen – baik dalam hal kualitas maupun kuantitas – dibanding pada periode sebelumnya. Tentu ada sejumlah tantangan dan masalah serius yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Kristen, antara lain sebagai dampak dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) no. 20 tahun 2003, terutama Pasal 12 (1) a: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Hal ini masih akan kita lihat lebih lanjut. Kendati demikian, Pendidikan Kristen masih punya peluang untuk berkiprah lebih nyata di negeri ini.

### **Perkembangan Wawasan Pendidikan Kristen**

Perkembangan usaha pendidikan Kristen yang dikemukakan di atas tentu ditopang juga oleh perkembangan wawasan para penyelenggara pendidikan Kristen di negeri ini. Seperti yang terjadi di Barat, bahkan juga seperti yang terlihat sejak awal kekristenan di dunia ini, para pemimpin dan pelayan atau pengerja gereja memahami dan melaksanakan pendidikan sebagai bagian integral dari tugas gereja. Pendidikan – selain sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan – juga dipahami sebagai proses penanaman ajaran dan nilai-nilai kristiani, yang bertujuan mengubah dan memperbaiki kualitas hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Bila dikaitkan dengan tri-tugas Gereja (marturia/kesaksian, koinonia/pembinaan persekutuan, dan diakonia/pelayanan kasih) maka kegiatan dan usaha pendidikan masuk ke dalam ketiga tugas itu. Dengan kata lain, pendidikan dipahami dan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menyaksikan dan memberitakan Injil Kristus (yang pada masa lalu identik dengan mengkristenkan dan mendirikan gereja), juga sebagai usaha untuk membina iman dan ketaatan atau disiplin warga gereja, dan sebagai upaya untuk menolong warga gereja (bahkan juga

masyarakat luas) untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

Ketika terjadi reformasi Gereja di Eropa sejak awal abad ke-16, para tokoh reformasi dan para pengikut mereka (baik pribadi-pribadi maupun gereja-gereja) juga memberi perhatian dan mengupayakan reformasi di bidang pendidikan. Martin Luther – berdasarkan semboyan dan asas imamat am orang percaya – menjadi salah seorang penggagas pendidikan semesta (pendidikan bagi semua orang). Untuk itu, salah satu langkah pertama yang digagas Luther adalah meningkatkan profesi dan kualitas guru. Melanchthon – dengan latar belakang humanismenya – memperkaya wawasan pendidikan para reformator dengan mengobarkan semangat ilmiah di lingkungan gereja dan masyarakat. Calvin mencanangkan peranan pendidikan untuk memajukan agama Kristen maupun memperbaiki kehidupan pribadi dan masyarakat, termasuk melalui penyampaian ilmu pengetahuan umum. Menurut Calvin, para pelayan gereja juga harus terdidik dalam ilmu pengetahuan, di samping dalam hal ajaran dan seluk-beluk kehidupan gereja. Setelah reformasi abad ke-16, di kalangan Protestan tampil sejumlah tokoh dan pemikir pendidikan Kristen, a.l. J.A. Comenius, A.H. Francke, Immanuel Kant, J.H. Pestalozzi, dan F.W.A. Froebel; mereka memperdalam dan mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan Kristen yang dicetuskan para reformator.<sup>15</sup>

Pada zaman zending (sekitar tahun 1815-1942) wawasan dan praksis pendidikan yang cukup komprehensif itu diwarisi dan dikembangkan badan-badan zending, sekaligus dicoba sesuaikan dengan lapangan penginjilan dan pelayanan masing-masing. Baik para pemimpin dan pemikir di tanah air masing-masing (terutama di Eropa) maupun para zendeling (utusan zending) di lapangan penginjilan, termasuk di Indonesia, menyelenggarakan pendidikan menyatu dengan penumbuhan dan pengembangan gereja. Para murid tidak hanya dididik untuk

15 Rangkuman sejarah dan wawasan pendidikan para reformator dan sejumlah pemikir Protestan di bidang pendidikan a.l. terdapat dalam Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak*, 84–99; Uraian yang lebih lengkap terdapat dalam Robert. R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Plato sampai Ignatius Loyola* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015); Robert. R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).

memperoleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan, atau untuk mencerdaskan kehidupan mereka, melainkan juga untuk memahami dan memberlakukan ajaran dan nilai-nilai kristiani, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi warga gereja dan warga negara yang baik. Kendati pada masa itu istilah *multiple intelligence* belum dikenal, tetapi pengertian yang terkandung di dalam istilah ini sudah mulai dikembangkan. Para siswa tidak hanya dididik untuk memiliki kecerdasan intelektual, melainkan juga berbagai kecerdasan lain: kecerdasan spiritual, emosional, hubungan antar-pribadi, bahasa, musik, ruang, dst. Karena itulah produk pendidikan Kristen atau zending sebelum Indonesia merdeka sangat banyak yang handal.

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, kita mengenal sejumlah tokoh dan pemikir Kristen di bidang pendidikan; mereka bukan hanya yang berpikir dan berupaya memajukan pendidikan Kristen, melainkan juga pendidikan nasional, pendidikan bagi seluruh rakyat. Banyak dari antara mereka kemudian diberi kepercayaan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia menjadi pejabat negara di bidang pendidikan, bahkan hingga tingkat menteri. Tanpa bermaksud melupakan sekian banyak tokoh dan pakar pendidikan dari kalangan Katolik maupun non-Katolik, karena keterbatasan ruang, waktu dan literatur sumber, maka di sini hanya empat orang saja yang ditampilkan (seorang dari kalangan Katolik dan tiga orang dari non-Katolik), terutama yang berkiprah pada masa Orde Baru dan orde Reformasi.

Yang pertama adalah Pater J. Drost, SJ.<sup>16</sup> Dalam salah satu tulisannya ia mengingatkan tugas sekolah dalam mendidik, bukan sekadar mengajar:

Sekolah yang hanya menghasilkan orang yang suci dan alim, tetapi dengan pengetahuan rendah, bukan sekolah. Namun mutu akademis sekolah bukan satu-satunya yang penting. Perhatian harus ditujukan kepada menghargai orang lain walau berbeda pendapat. Saling mempercayai ketrampilan sosial, saling mengampuni, membantu para pelajar menjadi pribadi dewasa. ... Suatu sekolah merupakan sebuah kebersamaan dari para pelajar yang harga-menghargai satu sama lain. Kebersamaan ini memungkinkan timbulnya hubungan pribadi yang otentik antara pengajar dan pelajar. Tanpa hubungan semacam itu kekuatan khas

16 Pater J. Drost (lahir 1 Agustus 1925, † 19 Februari 2005) memangku sejumlah jabatan di lingkungan pendidikan Katolik di negeri ini, a.l. dosen dan rektor IKIP Sanata Dharma (sekarang Universitas) Yogyakarta, dosen di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), UGM, dan Unika Atmajaya; serta Kepala SMU Kanisius dan Gonzaga di Jakarta.

pendidikan dan pengajaran kita akan melemah sampai menghilang. ... Refleksi harus selalu mengantar pelajar kepada makin menghargai hidup orang lain dan kepada kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang menunjang atau menghalangi pengembangan dan pertumbuhan kita semua sebagai anggota bangsa manusia. Ini semua mengandaikan bahwa para pengajar sadar akan nilai-nilai ini dan bertekun melaksanakannya.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan pendidikan nilai dan pendidikan budi pekerti, yang semakin disadari pentingnya oleh sekolah-sekolah dalam rangka pendidikan yang holistik dan komprehensif, Paul Suparno dan Drost a.l. mencatat dan mengingatkan:

Pendidikan budi pekerti bukan hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diajarkan lewat pelajaran apa pun, termasuk lewat situasi sekolah yang dibangun berdasarkan budi pekerti tersebut. Dengan demikian budi pekerti bukan [hanya] menjadi kewajiban guru budi pekerti, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh guru dan bahkan seluruh staf sekolah. ... Dalam pengertian ini menjadi jelas bahwa guru di sekolah bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik siswa untuk menjadi orang yang baik. ... Budi pekerti adalah karakter, akhlak, dan juga nama untuk cara membentuk karakter itu. Namun, itu [adalah] penghayatan, cara hidup, filsafat hidup. Bukan pemahaman, bukan pengertian, maka bukan teologi. Jadi tidak ada budi pekerti sebagai bahan pengajaran. ... Di dalam sebuah sekolah tanggung jawab pokok untuk pembentukan moral maupun intelektual dari pelajar tidak terletak pada salah satu prosedur atau kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler, akan tetapi pada pengajar. ... Pengajar, yang mengajar dan membentuk manusia muda menjadi pribadi yang dewasa, merupakan kunci dalam proses pembelajaran.<sup>18</sup>

Yang kedua adalah Aris Pongtuluran (1932-2019).<sup>19</sup> Dalam salah satu tulisannya, ketika coba menawarkan jalan keluar terhadap sekian banyak masalah yang dihadapi pendidikan Kristen, Pongtuluran a.l. berkata:

Program pembinaan anak usia dini yang berkualitas mendorong perkembangan mental, spiritual, emosional dan fisik anak. Gereja harus turun tangan dengan kesadaran penuh, kalau kita mau berhasil membina SDM/insani kristiani yang berkualitas dan yang diharapkan untuk membangun masyarakat kristiani, bahkan masyarakat bangsa kita yang kita cintai ini secara keseluruhan. Kasih sayang pada usia dini sangat menentukan; tanpa itu anak pada usia dewasa akan memperlihatkan perilaku memberontak dan ketidak-pedulian sosial. ... Adalah sangat penting bila gereja dan organisasi-organisasi Kristen menyadari bahwa pendidikan anak, remaja dan pemuda menuntut perhatian kita sepenuhnya sebagai bagian integral dari persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita.<sup>20</sup>

Pada tulisan lain, dalam menjelaskan misi Pendidikan Kristen (PK), Pongtuluran berkata:

17 J. Drost, *Dari KBK sampai MBS: Esai-esai Pendidikan* (Jakarta: Kompas, 2005), 57–58.

18 Drost, *Dari KBK sampai MBS*, xiii, 35–36.

19 Aris Pongtuluran adalah mantan guru besar UNJ, mantan pakar di bidang Perencanaan dan Manajemen Pendidikan. Pernah memegang jabatan Direktur Perencanaan pendidikan di Depdikbud dan lama menjabat sebagai rektor Universitas Kristen Petra Surabaya.

20 Pongtuluran, “Pendidikan Kristen di Indonesia.”

PK, selaku pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai kristiani atau yang bersumber dari iman Kristen, siap melayani setiap orang/peserta didik dengan kasih untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, bersikap mandiri, kreatif dan inovatif, yang mempunyai kerinduan untuk melayani sesama. PK itu pun akan mengusahakan transformasi peserta didik menjadi calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman, bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa damai dan sejahtera; di samping itu ia dibekali dengan sikap peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu secara bersama-sama akan menuju kepada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>21</sup>

Yang ketiga adalah Henry A. R. Tilaar (1932-2019).<sup>22</sup> Karena Tilaar lebih banyak menggeluti pendidikan nasional – baik secara konseptual maupun operasional – maka pemikirannya tidak selalu langsung berkait dengan pendidikan Kristen. Namun demikian di dalamnya kita dapat menemukan gagasan yang beraroma religius-kristiani, yang dekat dengan pemikiran para tokoh lainnya. Setelah menguraikan perkembangan pendidikan di negeri ini selama 50 tahun, pada epilog mahakaryanya, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995*, yang diberi judul “Pendidikan di Indonesia 2045”, Tilaar antara lain berkata:

Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat haruslah diabdikan kepada kemakmuran bersama. Masyarakat masa depan akan bertumpu di atas sendi-sendi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila kita tidak pandai-pandai memanfaatkannya bisa saja ilmu pengetahuan akan mengganti keyakinan umat manusia yang bertuhankan ilmu dan teknologi. Apabila hal ini terjadi maka kehidupan manusia kehilangan *dignity*, oleh karena segala sesuatu akan ditentukan oleh iptek dan diarahkan kepada hedonisme dan materialisme. Seharusnya kemajuan iptek akan lebih mengembangkan penghayatan manusia terhadap Sang Pencipta alam semesta, karena sepintar-pintarnya manusia pada akhirnya harus mengakui keterbatasannya. Ilmu pengetahuan seyogianya semakin mendekatkan manusia kepada suatu pengakuan kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, merupakan tugas umat manusia untuk terus menerus memelihara dan mengembangkan keyakinan dan agamanya terhadap penghayatan atas kekuatan yang Adikuasa. ... Kemajuan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moral dan religi, oleh sebab kemajuan ilmu pengetahuan dapat melunturkan kerendahan hati manusia dan dapat menyuburkan keangkuhan dan keserakahan manusia akan kekuasaan yang tanpa batas. Pembangunan moral dan pengembangan religi merupakan suatu syarat utama bagi kesinambungan hidup manusia yang bermoral.<sup>23</sup>

- 21 Aris Pongtuluran, “Kajian tentang Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen,” dalam *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional*, ed. oleh Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 12–17.
- 22 Henry Alexis Rudolf Tilaar adalah mantan guru besar UNJ, menjabat sejumlah jabatan di BAPPENAS, a.l. Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia (1986-1993), dan menulis sejumlah buku tentang pendidikan.
- 23 Henry A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945–1995* (Jakarta: Grasindo, 1995), 619; Bandingkan dengan Henry A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 29–30 Pendidikan sebagai pengembangan akhlak mulia serta

Berkait dengan itu, dalam karyanya yang lain, yang menawarkan pedagogik transformatif bagi Indonesia yang menjalani proses reformasi, Tilaar mengemukakan pandangan tentang pendidikan sebagai proses pembebasan bagi manusia Indonesia. Ia menandakan:

Di dalam proses humanisasi manusia Indonesia, tentunya terdapat berbagai hambatan untuk mewujudkan profil manusia Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut perlu dihindari dan dinamika manusia Indonesia itu diarahkan kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Manusia Indonesia haruslah dibebaskan dari kecenderungan-kecenderungan negatif yang menghalangi proses humanisasinya itu. Halangan-halangan tersebut antara lain [adalah] sikap yang tidak mengenal sumber etika dan moral masyarakat Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam mewujudkan nilai-nilai etika dan moral tersebut, tentunya diperlukan sikap toleransi yang tinggi atau sikap inklusif. Sikap-sikap dogmatis-fanatis atau eksklusif yang tidak mengakui adanya kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia tentunya tidak membebaskan manusia Indonesia itu untuk mewujudkan masyarakat yang bhineka. Demikian juga pendidikan nasional, harus dapat membebaskan manusia dari kemiskinan dan penindasan. Berbagai penindasan, seperti penindasan jender [dan] penindasan mayoritas, dapat muncul baik dari pemimpin lokal, masyarakat lokal, bahkan juga masyarakat nasional. Pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan berkeadilan. ... Di dalam suatu masyarakat yang demokratis, pendidikan adalah milik dari *the stakeholder*. Pendidikan bukanlah milik dari pemerintah saja, tetapi adalah milik masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat harus diikutsertakan di dalam setiap proses humanisasi generasi muda. Inilah pendidikan dari dan untuk masyarakat. ... Pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia Pancasila merupakan kunci yang sangat strategis dalam memelihara dan mengembangkan masyarakat, bangsa, negara Indonesia dalam perubahan besar era milenium ketiga.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan sikap toleransi yang harus dikembangkan dalam pendidikan nasional, Tilaar juga mengingatkan agar Perguruan Tinggi Kristen (PTK) menjadi pusat pengembangan sikap toleransi sekaligus pengembangan komitmen kepada keunggulan.

Menghadapi budaya global abad 21 yang cenderung melindas budaya lokal maka toleransi di dalam bangsa kita sendiri merupakan syarat mutlak. PTK haruslah memelopori pengembangan sikap toleransi di dalam masyarakat kampusnya. Hal ini berarti bahwa, sadar akan misinya sebagai PTK, kehidupan di dalam budaya Kristen adalah kehidupan yang tidak membedakan keyakinan, jender, sukubangsa, dalam rangka mewujudkan visi pendidikan tinggi Kristen sebagai suatu sub-sistem dari pendidikan tinggi nasional. ... PTK adalah suatu *testimonium*. Ini berarti bahwa PTK bukanlah alat politik, juga bukanlah alat propaganda agama. PTK mempunyai ciri khas sebagai suatu lembaga Kristen yang menerangi sekitar, bukan menaklukkannya. Sejalan dengan fungsi PTK sebagai *testimonium* adalah

---

religius.

24 Henry A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002), 201–3.

komitmen kepada keunggulan. Keunggulan akademik, keunggulan disiplin, dan berbagai jenis keunggulan lainnya hendaknya merupakan *tenet* dari PTK.<sup>25</sup>

Yang keempat adalah Andar Ismail.<sup>26</sup> Dalam salah satu tulisannya Andar Ismail antara lain mengingatkan: “Mendidik bukan sekadar pekerjaan. Mendidik adalah ajakan Allah untuk bekerjasama: kita menabur benih dan Allah yang menumbuhkan.”<sup>27</sup> Di tempat lain ia juga menandaskan:

Dalam arti luas, belajar adalah mengembangkan mutu pemahaman dan sikap hidup terhadap diri sendiri, orang lain, alam, benda kehidupan serta kematian, dan tentunya juga terhadap Pencipta semua itu. Dalam arti luas ini, kita hidup untuk belajar. Dalam arti luas ini, belajar tidak ada akhirnya. ... Mengajar dalam arti luas adalah menolong orang bertumbuh dalam pemahaman dan nilai-nilai hidup. Mengajar adalah menabur benih nilai-nilai hidup. Kita belajar untuk hidup. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita hidup untuk belajar. ... Hidup itu belajar. Hidup itu menabur. Menabur benih di hati sendiri dan menabur benih di hati orang lain. Kita hidup untuk menabur. Menabur iman, ilmu dan pelayanan.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan itu Andar Ismail juga mengingatkan (sambil menggugat): “Gereja yang mula-mula adalah gereja yang sibuk dengan kegiatan belajar dan mengajar. Apakah yang bisa disebut tentang gereja kita sekarang, apakah gereja kita juga sibuk belajar dan mengajar?”<sup>29</sup> Dan dalam tulisannya yang lain ia juga menegaskan bahwa tujuan utama sekaligus ciri khas sekolah Kristen adalah menyediakan wadah bagi proses yang serasi antara perkembangan skolastik intelektual dan perkembangan iman Kristen.<sup>30</sup> Dengan itu, Ismail sekaligus mengoreksi beberapa rumusan lain yang tidak akurat tentang tujuan utama ataupun ciri khas sekolah-sekolah Kristen, misalnya: mencerdaskan bangsa dan mendidik generasi masa depan bangsa (karena sekolah-sekolah lain pun punya tujuan itu); memberi pendidikan yang bersifat kristiani (karena ini adalah juga tugas gereja);

25 Henry A. R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21* (Jakarta: Tera Indonesia, 1998), 277–78.

26 Andar Ismail (1940-2025), pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI), adalah pakar Pendidikan Kristiani dan dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Menulis banyak buku tentang pendidikan.

27 Andar Ismail, *Selamat Menabur: 33 Renungan tentang Didik-Mendidik*, 13 ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 3.

28 Ismail, *Selamat Menabur*, 121–23.

29 Ismail, *Selamat Menabur*, 91.

30 Andar Ismail, “Misi dan Visi Sekolah Kristen di dalam Masyarakat Majemuk Indonesia yang Sedang Membangun,” dalam *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional*, ed. oleh Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 108–14.

dan menolong anak-anak mengenal Yesus Kristus (karena ini justru adalah tugas gereja dan orangtua).

Selain gagasan, wawasan dan pemikiran yang dikemukakan secara individual, tentu banyak juga yang dikemukakan secara kolektif, antara lain di dalam dan melalui forum-forum yang digelar oleh MPPK (sekarang menjadi Majelis Pendidikan Kristen, MPK) dan Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI), termasuk di dalam tulisan-tulisan yang dihasilkannya. Namun demikian – sekali lagi – karena keterbatasan ruang, di sini tidak dikemukakan hasil dari pemikiran bersama itu.

### **Potensi dan Sumbangan Pendidikan Kristen**

Dari penelusuran di atas, kita sudah sedikit-banyak melihat potensi yang dimiliki kalangan Pendidikan Kristen dan sumbangan yang telah diberinya. Kita akan menggarisbawahi beberapa di antaranya. Pertama, kita sudah memiliki sejarah dan pengalaman yang panjang di bidang pendidikan. Secara umum untuk kalangan Kristen – termasuk sejumlah lembaga gereja – sudah cukup terlatih menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan atau persekolahan. Dalam hal SDM, cukup banyak tersedia tenaga pendidik (guru dan dosen, termasuk instruktur di berbagai bidang studi), tenaga kependidikan (ahli manajemen pendidikan, administrator, tenaga laboratorium, bengkel, dsb.), bahkan para pakar dan pemikir di bidang pendidikan. Seandainya ada sebuah organisasi atau komunitas Kristen berencana mendirikan lembaga pendidikan (dari TK hingga Perguruan Tinggi), tidak terlalu sulit bagi kita merekrut tenaga yang relatif bermutu.

Kedua, kalangan Kristen sejak semula sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Juga ada pemahaman tentang identitas dan ciri khas pendidikan Kristen, tanpa memisahkan diri dari pendidikan nasional. Sejumlah gagasan dan wawasan yang dikemukakan di atas barulah sebagian kecil dari kekayaan pemikiran yang sudah dicetuskan sejak awal keberadaan pendidikan Kristen di muka bumi. Karena itulah, setiap kali ada upaya memikirkan-ulang atau membarui sistem pendidikan nasional

ataupun mengembangkan aspek-aspek tertentu pendidikan nasional, kalangan Kristen cukup sering dilibatkan atau memberi sumbangan, kendati pemikirannya tidak otomatis diterima, bahkan kadang-kadang ditolak juga.

Ketiga, adanya orang-orang atau kelompok atau komunitas tertentu yang punya komitmen maupun dana. Kalangan Kristen yang terpanggil atau berkomitmen di bidang pendidikan tidak hanya terwujud dalam bentuk lembaga gereja. Ada banyak komunitas atau kelompok Kristen di negeri ini yang berada di luar lembaga gereja – mereka ini bisa juga kita sebut *parachurch* – yang sejak dulu berkiprah di bidang pendidikan formal. Bahkan seandainya diinventarisasi, lembaga pendidikan formal yang mereka selenggarakan – mulai dari TK hingga perguruan tinggi – lebih banyak daripada yang diselenggarakan lembaga gereja.<sup>31</sup> Komunitas di luar gereja ini – banyak berwujud yayasan – adalah juga aset umat Kristen yang sangat berharga, yang perlu terus dipupuk dan dimotivasi.

Keempat, kalangan Kristen mewarisi cukup banyak aset fisik berupa lahan dan bangunan, dari badan zending atau misi dan berbagai lembaga pendidikan atau persekolahan Kristen pada masa penjajahan. Sebagian dari itu menyatu dengan lahan gereja. Dengan demikian banyak gereja atau perhimpunan Kristen yang tidak harus memulai dari nol. Jika kita coba menilai harga seluruh aset yang diwariskan itu, terutama yang terletak di kota-kota besar, pastilah ratusan milyar rupiah, bahkan mungkin trilyunan. Sangat disayangkan, ada saja pengurus atau pengelolanya yang serakah, mencari keuntungan bagi diri sendiri, sehingga berani menjual lahan dan gedung sekolah yang bukan miliknya itu. Riwayat aset-aset itu memperlihatkan betapa rapuhnya warisan tersebut bila tidak dikelola dengan jujur dan tertib. Di Tanah Batak, kompleks seminari Sipoholon sempat ditutup dan bangunannya dijadikan gudang dan barak pada masa Jepang; sejumlah bekas sekolah zending kini menjadi sekolah negeri, seperti bekas sekolah pertukangan di Laguboti dan bekas HIS Sigompulon; lahan seminari Narumonda dipakai lembaga

---

31 Pongtuluran mencatat bahwa pada sekitar tahun 1998 jumlah sekolah yang tergabung di dalam MPPK sekitar 5.000 buah. Sebagian besar diselenggarakan oleh yayasan (jumlahnya 200-an) yang didirikan di luar lembaga gereja. Boleh jadi jumlah itu sekarang semakin meningkat. Pongtuluran, "Pendidikan Kristen di Indonesia," 2.

lain;<sup>32</sup> dan hingga kini masih ada pihak yang mengklaim tanah Pearaja sebagai miliknya.<sup>33</sup> Di Jakarta, setelah VCS bubar sekitar 1958, aset-asetnya diserahkan kepada Himpunan Sekolah Kristen (HSK), yang sekitar 1990 menghibahkan semua tanah dan bangunannya kepada enam lembaga Kristen: LAI, PGI, YBPK, UKI, PSKD, dan BPK Penabur. Namun, pada 1991 pimpinan YBPK menjual lahan seluas 8.000 meter persegi, tempat Sekolah Pendidikan Guru YBPK berdiri, kepada Yayasan Administrasi Indonesia. PGI kemudian menggugat penjualan itu karena dinilai melanggar kesepakatan antarlembaga untuk tidak menjual aset hibah tanpa persetujuan lembaga-lembaga lainnya.<sup>34</sup>

### **Tantangan yang Dihadapi dan Peluang yang Dimiliki**

Dari uraian di atas kita sedikit-banyak juga sudah melihat berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi kalangan pendidikan Kristen di negeri ini. Contoh yang baru saja disebut di atas merupakan salah satu tantangan juga, yaitu sejauh mana para pengurus dan pengelola pendidikan atau persekolahan Kristen memiliki integritas, kejujuran, dan kerelaan melayani, dan tidak tergoda oleh kesempatan mencari untung pribadi. Kita tidak akan mengulas lagi semuanya secara panjang-lebar. Cukuplah kita mengangkat beberapa masalah atau kasus.

Yang pertama adalah ketentuan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) no. 20 tahun 2003, pasal 12 (1) a: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Ketentuan ini sebenarnya sudah muncul dalam GBHN yang ditetapkan MPR pada tahun 1998, yaitu pada butir tentang Pendidikan. Di situ antara lain dikatakan:

... Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pengajaran dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dengan tenaga pengajar pendidikan agama yang harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan pada semua jenis dan jenjang pendidikan ...<sup>35</sup>

32 Aritonang, *Mission Schools in Batakland*, 312-13, khususnya catatan 14.

33 Aritonang, *Raja Pontas Lumbantobing*, 136.

34 "YBPK Tidak Berhak Menjual Aset," 4.

35 Dikutip oleh Pongtuluran, "Pendidikan Kristen di Indonesia," 2; Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Legis. No. 20 Tahun 2003,

Bahkan bila dirunut lebih jauh ke belakang, masalah ini sudah muncul ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU-SPN) pada tahun 1988. Rumusan di atas sudah diusulkan kalangan Islam agar masuk ke dalam UUSPN yang sedang dirancang itu. Akhirnya rumusan itu tidak masuk ke dalam batang tubuh UUSPN no. 2/1989, melainkan ke dalam Penjelasan dari pasal 28 ayat (2) maupun turunan dari UUSPN ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no. 28/1990 pasal 16, dan PP no. 29/1990 pasal 17 yang dengan tegas menyatakan “hak siswa untuk memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya”.<sup>36</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam TAP MPR/GBHN 1998 di atas, oleh kalangan Kristen dilihat sebagai ancaman terhadap ciri khas dan identitas, bahkan eksistensi, pendidikan Kristen di negeri ini. Pada tahun 1998-2000 kalangan pendidikan Kristen, terutama yang bergabung di dalam MPPK dan BK-PTKI, mengadakan serangkaian seminar dan kajian atas masalah ini. Mereka sependapat bahwa ketentuan itu bertentangan dengan UUSPN no. 2/1989 (terutama pasal 47) maupun GBHN 1978 hingga 1993 yang menjamin eksistensi dan memberi hak kepada lembaga pendidikan swasta untuk memiliki dan mempertahankan ciri khas dan identitasnya, termasuk pendidikan agama yang sesuai dengan yang dianut oleh lembaga penyelenggara pendidikan itu. Karena itu mereka berjuang agar ketentuan itu dicabut.<sup>37</sup> Namun dalam kenyataannya di dalam UU Sisdiknas no. 20/2003 ketentuan itu – sebagaimana dikutip di atas – lebih dipertegas, yaitu pada pasal 12 ayat (1) a. Bahkan dalam salah satu turunan dari UU Sisdiknas ini, yaitu PP no. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, ketentuan itu lebih dipertegas lagi, yaitu pada pasal 4 ayat (2): “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat

---

Tahun 2003 Nomor 78 Lembaran Negara Republik Indonesia (2003).

36 UU No. 20 Tahun 2003; Kajian atas masalah yang muncul dalam RUU-SPN 1988, UUSPN 1989 dan UU Sisdiknas no. 20/2003 ini lihat juga dalam Artonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, 588–91.

37 Kajian itu a.l. dimuat dalam Weinata Sairin, ed., *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003).

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”<sup>38</sup>

Dapat dimengerti kalau kalangan pendidikan Kristen cukup dirisaukan oleh ketentuan perundang-undangan di atas, karena sudah berabad-abad lembaga pendidikan Kristen melihat dan menyampaikan Pendidikan Agama Kristen sebagai salah satu identitas dan ciri khasnya. Tetapi berdasarkan uraian di atas, menurut penulis ketentuan perundang-undangan itu belum menutup peluang bagi kalangan pendidikan Kristen untuk melanjutkan kiprahnya, karena identitas pendidikan atau sekolah-sekolah Kristen bukan hanya sekadar pendidikan atau pengajaran agama Kristen, melainkan juga dan terutama penanaman nilai-nilai Kristiani. Di berbagai negara Asia yang jumlah penduduk beragama Kristennya sangat kecil, terdapat juga sejumlah sekolah dan perguruan tinggi Kristen yang besar (misalnya Doshisha University di Kyoto-Jepang dan Payap University di Thailand). Di situ tidak diberikan mata kuliah Agama Kristen melainkan Etika. Mata kuliah ini tidak secara eksplisit disebut Etika Kristen, tetapi muatannya adalah nilai-nilai moral dan etika Kristen. Dan bila disebut Moral atau Etika maka yang dimaksud bukan sekadar moral pribadi (a.l. kesalehan dan kesucian pribadi) melainkan juga dan terutama adalah moral dan kesalehan sosial, kepedulian terhadap sesama bahkan terhadap lingkungan hidup ciptaan Tuhan.

Yang kedua mengenai sekolah unggulan. Cukup banyak sekolah Kristen menyebut diri atau berusaha menjadi sekolah unggulan. Yang biasa disebut atau dipahami sebagai sekolah unggulan adalah sekolah-sekolah yang menghasilkan siswa berprestasi dalam hal-hal yang menyangkut iptek, termasuk menjadi pemenang Olympiade Fisika, Matematika, dsb. Tentu prestasi di bidang iptek sangat penting, apalagi kalau mau bersaing di dunia modern yang terutama ditandai oleh perkembangan iptek. Tetapi keunggulan sekolah-sekolah Kristen mestinya bukan hanya – bahkan bukan terutama – di bidang itu. Tidak sedikit orang pintar di negeri

---

38 Pada pasal 4 memang terdapat juga suatu ketentuan yang sedikit memperlunak ayat (2), yaitu pada ayat (7): “Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.” Dengan demikian di sekolah Kristen, misalnya, tidak ada kewajiban mendirikan atau menyediakan mushola, pura, dsb.

kita ini, namun kepintarannya hanya digunakan untuk mendatangkan keuntungan dan kenikmatan bagi diri sendiri, bahkan dengan merugikan pihak lain. Melalui sekolah-sekolah unggulan yang diselenggarakan kalangan Kristen pasti kita tidak hendak menghasilkan manusia-manusia seperti itu, melainkan yang membawa berkat dan kemajuan bagi seluruh bangsa. Keunggulan sekolah-sekolah Kristen mestinya terlihat dalam nilai-nilai yang ditanam dan dalam sikap serta perilaku para pendidik, [maha]siswa, dan para lulusannya, sebagai buah dari internalisasi dan aplikasi nilai-nilai kristiani itu. Sehubungan dengan ini tengarai dan imbauan Samuel Karwur patut kita catat:

Pendidikan Kristen perlu berubah secara drastis. Pembinaan dan penanaman karakter Kristus harus benar-benar dilakukan. Jangan lagi kita berpuas diri karena para juara olimpiade sains berasal dari sekolah-sekolah Kristen. Jika kita tetap mau bertahan dengan pola pikir kuno seperti ini, maka mulailah bersiap untuk menjadi intelektual-intelektual kacung, jenius-jenius pembantu dan birokrat-birokrat ompong.<sup>39</sup>

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang masuk kategori unggulan itu, termasuk yang Kristen, pada umumnya menetapkan biaya studi yang mahal. Kita semua maklum bahwa biaya pendidikan, apalagi yang unggulan dan berkualitas, tentu sangat mahal. Tetapi kalau biaya yang mahal itu dikenakan secara merata kepada seluruh [maha]siswa, maka hanya anak-anak dari keluarga kayalah yang dapat memasukinya. Padahal rakyat Indonesia, termasuk yang Kristen (di NTT, Maluku, Papua, bahkan juga Tanah Batak, Kalimantan Tengah, Sulteng dan Toraja), sebagian besar masih miskin. Mestinya lembaga-lembaga pendidikan Kristen non-Katolik bisa belajar dari kalangan Katolik, yang tidak memukul rata biaya pendidikan, melainkan memberi jatah atau kuota sekitar 10-20% kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehubungan dengan itu, baik juga kita memperhatikan saran Tilaar, yaitu agar sekolah-sekolah unggulan yang didirikan oleh kalangan Kristen tidak segregatif terhadap keluarga miskin dan tidak berwatak komersial.<sup>40</sup> Begitu juga dengan saran Ferawaty: "Pendidikan Kristen harus memperhatikan dan

39 Samuel Karwur, "Pendidikan Kristen: KRITIS!," *Charisma Indonesia*, 21 Maret 2013, <https://karwursamuel.wordpress.com/2013/03/21/pendidikan-kristen-kritis/>; Bandingkan dengan Sendjaya, "Dunia Pendidikan Kristen."

40 Henry A. R. Tilaar, "Arah dan Pengembangan Pendidikan Kristen Menapak Abad Ke-21," dalam *Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, ed. oleh Weinata Sairin (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 30.

memperjuangkan rakyat kecil dan kaum yang lemah agar mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Gereja dan komunitas Kristen di Indonesia harus peka dan peduli dengan ketidakadilan yang terjadi, khususnya dalam hal pendidikan kepada rakyat kecil. ...”<sup>41</sup>

Yang ketiga adalah kualitas guru. Sebagaimana telah dicatat, kalangan pendidikan Kristen memiliki tradisi dan potensi besar dalam hal penyediaan tenaga guru, baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun demikian belakangan ini semakin banyak keluhan tentang hal itu.<sup>42</sup> Tentu keluhan ini juga bisa dikemukakan menyangkut guru-guru dari semua kalangan, termasuk guru-guru sekolah negeri, terutama mengingat tidak adanya lagi sekolah guru pada aras sekolah menengah dan semakin banyaknya IKIP berubah menjadi universitas (walaupun di dalamnya ada sejumlah program studi Pendidikan). Upaya dan program pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru, a.l. program sertifikasi, tentu patut kita hargai dan kita perlu mengusahakan agar guru-guru di semua sekolah Kristen mengikuti program ini sehingga pada gilirannya memperoleh Sertifikat Pendidik. Namun demikian patut juga dicatat bahwa banyak dari guru beragama Kristen peserta program ini yang kualitasnya sangat memprihatinkan, sehingga perlu dipertanyakan, apakah program sertifikasi ini akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas mereka? Persoalan ini juga diakui MPK sendiri. Dalam pemetaannya, menurunnya kualitas guru ditempatkan sebagai pangkal “lingkaran problem” sekolah Kristen, yang berujung pada merosotnya reputasi sekolah dan jumlah murid. MPK juga memperkirakan bahwa 21 fakultas keguruan di perguruan tinggi Kristen hanya menghasilkan sekitar 4.000 guru Kristen baru setiap tahun, dan mungkin hanya separuhnya yang akan mengajar di sekolah Kristen; MPK bahkan meminta pemerintah agar guru tetap sekolah Kristen tidak mudah beralih menjadi PPPK dan guru ASN yang ditempatkan di sekolah Kristen tidak ditarik.<sup>43</sup>

41 Ferawaty, “Krisis Pendidikan: Peluang Pendidikan Kristen Bermisi bagi Transformasi Bangsa,” Perkantas Jawa Timur, 2010.

42 Pongtuluran, “Kajian tentang Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen,” 14.

43 Irawan, “Tantangan dan Solusi Sekolah Kristen di Indonesia,” slide 12-13, 15, 34.

Yang terakhir adalah serangkaian kasus plagiarisme. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus plagiarisme sangat marak, termasuk dalam penyusunan borang akreditasi; bahkan juga melibatkan sejumlah dosen perguruan tinggi negeri yang sedang diproses menjadi guru besar. Perkembangan teknologi informasi memang membuat plagiarisme kian sulit dibendung dan kejujuran ilmiah semakin sulit ditegakkan. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Kehadiran kecerdasan artifisial generatif sejak akhir 2022 menambah kerumitan persoalan ini, karena teks buatan mesin dapat diserahkan sebagai karya sendiri tanpa mudah dikenali.<sup>44</sup> Menurut pengamatan FX Eko Armada Riyanto, guru besar Filsafat Etika Politik STFT Widya Sasana Malang, salah satu penyebab suburnya plagiarisme adalah karena tekanan dalam proses belajar-mengajar lebih diletakkan pada pencapaian nilai (angka) hasil belajar (pada rapor, kartu hasil studi, transkrip nilai, ijazah; pen.) dan hampir tidak ada yang peduli pada integritas dan proses pendewasaan serta perkembangan tanggung jawab pembelajar. Lebih lanjut ia mengungkapkan:

Plagiarisme akan tetap menjadi sebuah serial aktivitas sehari-hari bila skema perspektif pendidikan kita tidak berubah. Ketika sebuah kemajuan disempitkan pada ranah formal berupa angka, dengan sedikit perhatian pada proses pencapaiannya, pendidikan mengalami kemandekan. Pendidikan integritas tersisihkan. Plagiarisme adalah tindakan pencurian kreativitas intelektual. Sebagai sebuah tindakan mencuri, plagiarisme memiliki konsekuensi etis-deontologis sebagai perbuatan [ter]cela. Namun, mencela pun juga tidak cukup. Apalagi hidup sehari-hari bangsa kita dekat dan lekat dengan aneka kemerosotan tercela berupa “mencuri” hak-hak kebebasan orang lain atau uang rakyat dalam wujud korupsi. ... Maraknya plagiarisme adalah *emblem* redupnya cita rasa kreatif, ilmiah, dan miskinnya pergumulan paradigmatis, di samping rusaknya bangunan nurani kejujuran dan cinta kebenaran bangsa ini.<sup>45</sup>

Maraknya plagiarisme ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kalangan Kristen untuk lebih mempertegas dan mempromosikan penanaman nilai-nilai kristiani di dalam dan melalui proses pendidikan yang diselenggarakannya. Bukankah integritas dan kejujuran adalah dua dari nilai kristiani yang berulang kali dikemukakan di dalam Alkitab?

### Dari Krisis ke Revitalisasi: Sintesis Historis-Teologis

44 UNESCO, *Guidance for Generative AI in Education and Research* (Paris: UNESCO, 2023).

45 FX. Eko Armada Riyanto, “Kutuk Plagiarisme, Lalu?,” *Kompas*, 24 Februari 2010, 7.

Keempat tantangan yang diuraikan di atas tidak muncul begitu saja. Bila dibaca dalam terang sejarah, masing-masing memperlihatkan akar historis tertentu, dan karena itu juga dapat dijawab dengan menimba dari khazanah wawasan pendidikan Kristen sendiri. Di sinilah pemikiran Drost, Pongtuluran, Tilaar, dan Andar Ismail dapat dibaca bukan sebagai kumpulan kutipan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai lensa untuk merumuskan arah revitalisasi.

Pertama, kerisauan terhadap Pasal 12 UU Sisdiknas berakar pada cara pendidikan Kristen memahami dirinya sejak zaman zending dan misi, ketika pendidikan diposisikan sebagai pendukung penginjilan dan penginjilan dipahami identik dengan pengkristenan. Dalam kerangka itu, pelajaran Agama Kristen bagi semua murid menjadi penanda identitas yang paling kasatmata. Regulasi yang berlaku sekarang memaksa pendidikan Kristen meninjau ulang asumsi tersebut. Gagasan Drost dan Suparno bahwa pendidikan budi pekerti tidak terutama diajarkan sebagai mata pelajaran, tetapi dihidupi melalui seluruh situasi sekolah dan menjadi tanggung jawab semua guru, membuka jalan keluar: identitas Kristen dapat dipindahkan dari ruang kelas pelajaran agama ke seluruh ekologi nilai sekolah. Pengalaman Doshisha University dan Payap University yang disebut di atas menunjukkan bahwa model semacam ini dapat berjalan.

Kedua, orientasi sekolah unggulan yang mahal dan segregatif juga memiliki jejak historis. Sejak masa Hindia Belanda, pendidikan Kristen menjadi jalan mobilitas sosial: lulusan sekolah zending di Minahasa, Tanah Batak, dan Maluku mengisi jabatan di pemerintahan dan perusahaan swasta, dan kehidupan sosial-ekonomi mereka pun meningkat. Warisan yang membanggakan ini menyimpan godaan, yakni menakar keberhasilan pendidikan semata-mata dari prestasi dan status lulusannya. Terhadap kecenderungan itu, Tilaar mengingatkan bahwa perguruan Kristen adalah *testimonium* yang menerangi sekitarnya, bukan alat untuk menaklukkannya, dan bahwa sekolah unggulan Kristen tidak boleh segregatif terhadap keluarga miskin ataupun berwatak komersial. Ferawaty mempertajam peringatan ini dengan menunjuk materialisme sebagai akar krisis pendidikan: ketika pendidikan berubah menjadi “ajang bisnis dan sarana untuk mendapatkan keuntungan,” biayanya makin

tinggi dan pendidikan makin sulit dijangkau masyarakat luas; karena itu gereja dan komunitas Kristen harus berupaya agar pendidikan “makin bersahabat dan berpihak kepada orang-orang miskin dan lemah.”<sup>46</sup> Kuota bagi anak dari keluarga kurang mampu, sebagaimana dipraktikkan di lingkungan Katolik, adalah salah satu wujud konkret keberpihakan itu.

Ketiga, persoalan mutu guru menyentuh salah satu warisan tertua pendidikan Kristen. Luther, sebagaimana telah dicatat, menjadikan peningkatan profesi dan kualitas guru sebagai salah satu langkah pertama reformasi pendidikan, dan badan-badan zending di Nusantara pun mengembangkan pendidikan guru. Hilangnya sekolah guru pada aras menengah dan berubahnya banyak IKIP menjadi universitas ikut menggerus tradisi itu. Drost menegaskan bahwa tanggung jawab pokok pembentukan moral dan intelektual pelajar terletak pada pengajar, sedangkan Andar Ismail memahami mendidik sebagai ajakan Allah untuk bekerja sama. Dengan demikian, revitalisasi tidak cukup ditempuh melalui sertifikasi formal; yang dibutuhkan adalah pembinaan guru yang memadukan kompetensi profesional dengan penghayatan atas panggilan mendidik.

Keempat, maraknya plagiarisme – kini diperumit oleh kecerdasan artifisial generatif – berkaitan dengan apa yang disebut Riyanto sebagai penyempitan kemajuan pendidikan pada angka. Warisan Melanchthon yang mengobarkan semangat ilmiah di lingkungan gereja, serta rumusan Andar Ismail tentang ciri khas sekolah Kristen sebagai wadah bagi perkembangan yang serasi antara kemampuan skolastik-intelektual dan iman, menunjukkan bahwa integritas akademik bukan tambahan etis dari luar, melainkan bagian dari hakikat pendidikan Kristen itu sendiri. Pongtuluran pun merumuskan misi pendidikan Kristen sebagai upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan inovatif – kualitas yang justru dilumpuhkan oleh budaya menyalin.

Dari keempat simpul ini tampak satu benang merah. Pendidikan Kristen di Indonesia sedang didorong – oleh regulasi, oleh pasar, dan oleh perubahan teknologi – untuk bergeser dari paradigma pengkristenan yang diwarisi dari zaman zending

---

46 Ferawaty, “Krisis Pendidikan.”

menuju paradigma kesaksian (*testimonium*) di tengah masyarakat majemuk. Pergeseran ini sebetulnya sudah dirintis oleh para pemikir yang dibahas di atas. Karena itu, krisis yang dihadapi sekarang tidak perlu dibaca sebagai tanda akhir, melainkan sebagai momentum revitalisasi: kesempatan untuk menegaskan kembali identitas pendidikan Kristen melalui ekologi nilai sekolah, mutu dan integritas pendidik, serta keberpihakan kepada kaum lemah.

### KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Kristen di Indonesia berkembang dari segelintir sekolah sederhana pada masa Portugis dan VOC, mencapai pengaruh terbesarnya pada masa zending dan misi, lumpuh pada masa pendudukan Jepang, bangkit kembali pada masa Orde Lama, lalu mengalami pertumbuhan sekaligus kemunduran pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sepanjang perjalanan itu, wawasan yang menopangnya – dari para reformator abad ke-16 hingga Drost, Pongtuluran, Tilaar, dan Andar Ismail – secara konsisten memahami pendidikan sebagai bagian integral dari tugas gereja yang memadukan pengembangan intelektual dengan penanaman nilai.

Di era kontemporer, pendidikan Kristen memiliki potensi berupa pengalaman panjang, sumber daya manusia, komunitas dan yayasan yang berkomitmen, serta aset fisik warisan zending dan misi. Namun, ia menghadapi empat tantangan pokok – regulasi pendidikan agama dalam Pasal 12 UU Sisdiknas, orientasi sekolah unggulan yang komersial dan segregatif, merosotnya mutu guru, serta krisis integritas akademik – yang masing-masing berakar pada pola historis tertentu: identifikasi pendidikan dengan pengkristenan, fungsi pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial, melemahnya tradisi pendidikan guru, dan penyempitan kemajuan pendidikan pada angka.

Secara teoretis, kajian ini menawarkan pembacaan bahwa krisis pendidikan Kristen merupakan bagian dari pergeseran paradigma, dari pendidikan sebagai sarana pengkristenan menuju pendidikan sebagai kesaksian di ruang publik yang majemuk. Dengan demikian, identitas dan ciri khas pendidikan Kristen tidak lagi

terutama ditentukan oleh mata pelajaran agama, tetapi oleh nilai-nilai yang dihidupi dalam seluruh kehidupan sekolah. Secara praktis, kajian ini mendorong yayasan dan pengelola sekolah Kristen untuk (1) merancang pendidikan nilai yang menyeluruh dan tidak bergantung pada mata pelajaran agama; (2) menetapkan kebijakan afirmatif, seperti kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu; (3) membangun pembinaan guru yang berkelanjutan, melampaui sertifikasi formal; dan (4) menegakkan kebijakan integritas akademik yang tanggap terhadap perkembangan kecerdasan artifisial.

Kajian ini terbatas pada studi kepustakaan dan pada empat tokoh yang dipilih. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menghimpun data kuantitatif runtun waktu tentang jumlah dan kondisi sekolah Kristen, serta untuk menguji secara empiris sejauh mana kecenderungan yang dikemukakan di sini berlangsung di berbagai daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S. *Mission Schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940*. Diterjemahkan oleh Robert. R. Boehlke. Studies in Christian Mission 10. Leiden: E.J. Brill, 1994.
- . *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu telaah Historis-Teologis atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.
- . *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Boehlke, Robert R. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Plato sampai Ignatius Loyola*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- . *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Drost, J. *Dari KBK sampai MBS: Esai-esai Pendidikan*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Ferawaty. "Krisis Pendidikan: Peluang Pendidikan Kristen Bermisi bagi Transformasi Bangsa." Perkantas Jawa Timur, 2010.
- Hutauruk, J. R., Naek L. Tobing, dan Nelson Siregar. *Raja Pontas Lumbantobing*:

*Riwayat Hidup, Karya, dan Pengabdianannya bagi Pengembangan dan Kemajuan Gereja dan Masyarakat Batak.* Disunting oleh Jan S. Aritonang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.

Irawan, Hendi D. "Tantangan dan Solusi Sekolah Kristen di Indonesia." Presentation. Bilangan Research Center; Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Mei 2023. <https://www.slideshare.net/slideshow/brcmpk-tantangan-dan-solusi-sekolah-kristen-di-indonesia-1pdf/260018332>.

Ismail, Andar. "Misi dan Visi Sekolah Kristen di dalam Masyarakat Majemuk Indonesia yang Sedang Membangun." Dalam *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional*, disunting oleh Weinata Sairin, 108–14. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

———. *Selamat Menabur: 33 Renungan tentang Didik-Mendidik*. 13 ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Karwur, Samuel. "Pendidikan Kristen: KRITIS!!" *Charisma Indonesia*, 21 Maret 2013. <https://karwursamuel.wordpress.com/2013/03/21/pendidikam-kristen-kritis/>.

Kroeskamp, Hendrik. *Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*. Assen: Van Gorcum, 1974.

Lazaruth, Soewadji. *Sejarah Pendidikan Kristen di Indonesia*. Jakarta: MPPK, 1984.

OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing, 2023.

Pongtuluran, Aris. "Kajian tentang Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen." Dalam *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional*, disunting oleh Weinata Sairin. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

———. "Pendidikan Kristen di Indonesia Menjelang Abad-21 dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia/Insani." Dalam *Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, disunting oleh Weinata Sairin, 1–8. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.

*Reformata*. "YBPK Tidak Berhak Menjual Aset." 16 September 2008.

Riyanto, FX. Eko Armada. "Kutuk Plagiarisme, Lalu?" *Kompas*, 24 Februari 2010.

Sairin, Weinata, ed. *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia: Antara Konseptual dan Operasional*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

Sendjaya. "Dunia Pendidikan Kristen."

Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.

Tilaar, Henry A. R. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945–1995*. Jakarta: Grasindo, 1995.

———. "Arah dan Pengembangan Pendidikan Kristen Menapak Abad Ke-21." Dalam *Partisipasi Kristen dalam Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, disunting oleh Weinata Sairin. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.

———. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Jakarta: Tera Indonesia, 1998.

———. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Tilaar, Henry A. R., dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Legis. No. 20 Tahun 2003, Tahun 2003 Nomor 78 Lembaran Negara Republik Indonesia (2003).

UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO, 2023.